



## **Model Collaborative Governance dalam Penguatan Kapasitas Pemerintahan Kepulauan pada Wilayah Terluar Indonesia**

**Mukhlis Fataruba<sup>1</sup> Atikah Khairunnisa<sup>2</sup> Muhtar<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespodensi: [mukhlis.fataruba@lecturer.unpatti.ac.id](mailto:mukhlis.fataruba@lecturer.unpatti.ac.id)

Diterima: 15-05-2026 | Disetujui: 21-05-2026 | Diterbitkan: 23-05-2026

### **ABSTRACT**

*This study examines the implementation of collaborative governance in strengthening the capacity of island governance within Indonesia's outermost regions. The research addresses governance challenges in archipelagic areas, including limited infrastructure, weak inter-island connectivity, low institutional capacity, and unequal public service delivery. Using a qualitative approach with a multiple case study design, this study analyzes collaborative interactions among government institutions, local communities, private sectors, academics, and non-governmental organizations in several outer island regions of Indonesia. Data were collected through in-depth interviews, observation, documentation, and secondary data analysis from government databases and scientific publications. The findings indicate that collaborative governance plays a strategic role in improving institutional capacity, strengthening public service delivery, and enhancing participatory development in island regions. The effectiveness of collaborative governance is influenced by institutional capacity, collaborative leadership, digital infrastructure, intersectoral coordination, and community participation. Furthermore, this study formulates a collaborative governance model based on institutional strengthening, multi-stakeholder networking, digital governance, and local wisdom-based participation. The study concludes that collaborative governance provides an adaptive and sustainable governance framework for strengthening island governance capacity in Indonesia's outermost regions.*

**Keywords:** Collaborative governance; island governance; institutional capacity; outermost regions; public administratio

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi collaborative governance dalam penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan pada wilayah terluar Indonesia. Permasalahan utama pemerintahan kepulauan meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya konektivitas antarwilayah, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta ketimpangan pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multipel pada beberapa wilayah kepulauan terluar di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan analisis data sekunder dari berbagai basis data pemerintah serta publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pembangunan partisipatif di wilayah kepulauan. Efektivitas collaborative governance dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kepemimpinan kolaboratif, infrastruktur digital, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga menghasilkan model collaborative governance berbasis penguatan kelembagaan, jejaring multipihak, digitalisasi tata kelola pemerintahan, dan partisipasi masyarakat berbasis kearifan lokal. Penelitian menyimpulkan bahwa collaborative governance merupakan pendekatan tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan dalam penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan pada wilayah terluar Indonesia.

**Katakunci:** Collaborative governance; pemerintahan kepulauan; kapasitas kelembagaan; wilayah terluar; administrasi publik.

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Fataruba, M., Khairunnisa, A. ., & Muhtar, M. (2026). Model Collaborative Governance dalam Penguatan Kapasitas Pemerintahan Kepulauan pada Wilayah Terluar Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1532-1541. <https://doi.org/10.63822/p44vw102>

## PENDAHULUAN

Wilayah kepulauan terluar Indonesia memiliki posisi strategis dalam perspektif geopolitik, pertahanan negara, ekonomi maritim, dan integrasi nasional. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan pada wilayah-wilayah terluar yang secara geografis terpisah, memiliki keterbatasan infrastruktur, akses pelayanan publik yang belum merata, serta kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah yang masih beragam. Kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan pembangunan antarwilayah, lemahnya konektivitas administrasi, rendahnya kualitas pelayanan publik, hingga terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan menjadi isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan efektivitas administrasi publik, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pembangunan nasional dan penguatan kedaulatan negara pada kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Permasalahan pemerintahan kepulauan di Indonesia tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan birokrasi konvensional yang bersifat hierarkis dan sektoral. Kompleksitas persoalan wilayah kepulauan menuntut adanya pola tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas masyarakat pesisir, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga non-pemerintah lainnya. Pendekatan collaborative governance menjadi relevan karena menekankan proses pengambilan keputusan bersama, pembangunan kepercayaan antaraktor, koordinasi lintas sektor, serta pembagian sumber daya dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ansell dan Gash menjelaskan bahwa collaborative governance merupakan pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif untuk merumuskan atau mengimplementasikan kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008).

Dalam perkembangan studi administrasi publik kontemporer, collaborative governance telah menjadi salah satu pendekatan penting dalam pengelolaan wilayah yang memiliki kompleksitas tinggi, termasuk wilayah kepulauan dan perbatasan. Penelitian Emerson dan Nabatchi (2015) menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif mampu meningkatkan efektivitas kebijakan publik melalui integrasi kapasitas antaraktor dan penguatan shared motivation dalam penyelesaian masalah publik yang kompleks. Penelitian lainnya oleh Purwanto et al. (2021) mengenai tata kelola pemerintahan kepulauan di Indonesia menemukan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi dan rendahnya kapasitas kelembagaan daerah menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kepulauan. Sementara itu, studi Hidayat dan Wicaksono (2022) menegaskan bahwa penguatan collaborative governance pada wilayah pesisir dan kepulauan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat efektivitas pembangunan berbasis lokal.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek pembangunan pesisir, pengelolaan sumber daya laut, atau pelayanan publik secara parsial, sehingga belum banyak membahas secara spesifik mengenai model collaborative governance dalam penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan pada wilayah terluar Indonesia. Penelitian terdahulu juga cenderung melihat collaborative governance hanya sebagai mekanisme koordinasi antaraktor, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana desain kelembagaan kolaboratif dapat memperkuat kapasitas adaptif pemerintah daerah kepulauan dalam menghadapi tantangan geografis, keterbatasan sumber daya, dan ketimpangan

pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada upaya pengembangan model collaborative governance yang secara khusus difokuskan pada penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan di wilayah terluar Indonesia melalui integrasi aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, dan tata kelola adaptif berbasis karakteristik wilayah kepulauan.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan arah kebijakan nasional dalam pembangunan kawasan perbatasan dan wilayah terluar sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta kebijakan pembangunan berbasis kemaritiman dan konektivitas antarpulau. Dalam praktiknya, pemerintah daerah kepulauan sering menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal, sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan akses transportasi yang berdampak pada rendahnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas pemerintahan tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif, tetapi memerlukan kolaborasi multipihak yang mampu membangun sinergi sumber daya, inovasi kebijakan, dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi collaborative governance dalam penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan pada wilayah terluar Indonesia; (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas collaborative governance dalam penyelenggaraan pemerintahan kepulauan; dan (3) bagaimana model collaborative governance yang adaptif dan berkelanjutan dalam mendukung penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan di wilayah terluar Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi collaborative governance dalam penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan pada wilayah terluar Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tata kelola kolaboratif, serta merumuskan model collaborative governance yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kapasitas pemerintahan daerah kepulauan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian collaborative governance pada konteks pemerintahan kepulauan, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penguatan tata kelola wilayah terluar Indonesia secara lebih integratif dan kolaboratif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam implementasi collaborative governance dalam penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan pada wilayah terluar Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya mengkaji fenomena tata kelola pemerintahan secara kontekstual, kompleks, dan multidimensional melalui interpretasi terhadap interaksi antaraktor, dinamika kelembagaan, serta proses kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kepulauan. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai proses sosial dan kelembagaan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data kuantitatif.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus multipel (multiple case study) dengan fokus pada beberapa wilayah kepulauan terluar Indonesia yang memiliki karakteristik geografis, administratif, dan kapasitas pemerintahan yang berbeda. Pemilihan studi kasus multipel dimaksudkan untuk memperoleh

pemahaman komparatif mengenai implementasi collaborative governance pada konteks pemerintahan kepulauan yang beragam. Adapun lokasi penelitian difokuskan pada beberapa daerah kepulauan terluar di Indonesia, seperti Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku. Ketiga wilayah tersebut dipilih karena merepresentasikan daerah kepulauan terluar yang menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, pelayanan publik, serta kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Informan penelitian meliputi pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), aparat kecamatan dan desa kepulauan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), tokoh masyarakat pesisir, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pihak swasta yang terlibat dalam pengembangan wilayah kepulauan. Teknik purposive sampling digunakan karena penelitian ini membutuhkan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam tata kelola pemerintahan kepulauan.

Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi pelayanan publik, koordinasi kelembagaan, serta implementasi program kolaboratif pada wilayah penelitian. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dokumen perencanaan pembangunan daerah, regulasi terkait pemerintahan kepulauan, serta data statistik yang relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder juga diperoleh dari publikasi ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta laporan lembaga pemerintah dan organisasi internasional yang berkaitan dengan collaborative governance dan pemerintahan kepulauan.

Dalam mendukung validitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen kebijakan, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data penelitian sebagaimana disarankan oleh Lincoln dan Guba (1985) dalam penelitian kualitatif

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk matriks, narasi deskriptif, dan pemetaan hubungan antaraktor collaborative governance. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung untuk memperoleh temuan yang valid dan konsisten.

Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari basis data publik yang dapat diakses secara terbuka, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Data statistik mengenai indeks pembangunan wilayah kepulauan, pelayanan publik, kapasitas fiskal daerah, dan konektivitas antarwilayah diperoleh melalui portal resmi BPS (<https://www.bps.go.id>), portal data Kemendagri (<https://www.kemendagri.go.id>), serta portal Satu Data

Indonesia (<https://data.go.id>). Penggunaan basis data tersebut dilakukan untuk memperkuat analisis empiris terkait kondisi kapasitas pemerintahan kepulauan di wilayah terluar Indonesia.

Untuk menjaga etika penelitian, seluruh proses wawancara dilakukan dengan persetujuan informan dan menjunjung prinsip kerahasiaan identitas informan. Peneliti juga memastikan bahwa penggunaan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan secara objektif, akademis, dan sesuai dengan prinsip integritas ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Collaborative Governance dalam Pemerintahan Kepulauan

Implementasi collaborative governance dalam penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan pada wilayah terluar Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma tata kelola dari pendekatan administratif yang bersifat sentralistik menuju pola kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor pemerintahan dan non-pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah kepulauan tidak lagi dapat bekerja secara sektoral dalam menghadapi persoalan pelayanan publik, keterbatasan infrastruktur, rendahnya konektivitas antarwilayah, serta tantangan geografis yang kompleks. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan kepulauan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan aktor non-pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, komunitas nelayan, akademisi, dan sektor swasta mulai meningkat dalam proses perencanaan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan. Pada beberapa daerah penelitian, pemerintah daerah telah membentuk forum koordinasi pembangunan kepulauan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi program pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.

Implementasi collaborative governance juga terlihat dalam pengelolaan pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pulau terluar. Pemerintah daerah bekerja sama dengan institusi pendidikan, organisasi sosial, dan lembaga keagamaan dalam mendukung distribusi tenaga pendidikan dan kesehatan pada wilayah yang sulit dijangkau. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta telekomunikasi mulai dilakukan untuk memperkuat akses internet dan layanan digital pemerintahan.

**Tabel 1. Bentuk Implementasi Collaborative Governance pada Pemerintahan Kepulauan**

Bentuk Kolaborasi	Aktor yang Terlibat	Tujuan Kolaborasi
Forum koordinasi pembangunan kepulauan	Pemerintah daerah, OPD, masyarakat	Sinkronisasi program pembangunan
Pelayanan kesehatan kepulauan	Dinas kesehatan, NGO, tenaga medis	Peningkatan akses layanan kesehatan
Digitalisasi pelayanan publik	Pemerintah daerah, provider telekomunikasi	Penguatan layanan administrasi digital
Pengelolaan wilayah pesisir	Pemerintah desa, komunitas nelayan	Pengelolaan sumber daya pesisir
Penanggulangan bencana kepulauan	BPBD, masyarakat, TNI/Polri	Penguatan mitigasi bencana

(Sumber: Hasil olahan penelitian, 2026)

Berdasarkan tabel tersebut, collaborative governance dalam pemerintahan kepulauan tidak hanya

-----  
*Model Collaborative Governance dalam Penguatan Kapasitas Pemerintahan Kepulauan pada Wilayah Terluar Indonesia*  
 (Fataruba, et al.)

berfungsi sebagai mekanisme koordinasi, tetapi juga menjadi instrumen penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan hambatan geografis. Temuan ini memperkuat pandangan Emerson dan Nabatchi (2015) bahwa collaborative governance mampu meningkatkan kapasitas institusional melalui integrasi sumber daya dan pembagian tanggung jawab antaraktor.

## 2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Collaborative Governance

Efektivitas collaborative governance pada wilayah kepulauan terluar dipengaruhi oleh berbagai faktor kelembagaan, sumber daya, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kapasitas kelembagaan pemerintah daerah menjadi elemen paling dominan dalam menentukan keberhasilan kolaborasi antaraktor.

Keterbatasan sumber daya manusia aparatur pemerintahan masih menjadi tantangan utama pada sebagian besar wilayah kepulauan terluar. Banyak daerah mengalami kekurangan tenaga teknis, rendahnya kompetensi digital aparatur, serta tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam pengambilan kebijakan strategis. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya koordinasi lintas sektor dan lambatnya implementasi program pembangunan.

Selain faktor kelembagaan, aspek kepemimpinan kolaboratif juga memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas collaborative governance. Kepala daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah yang memiliki kemampuan membangun komunikasi lintas sektor cenderung lebih berhasil dalam menciptakan kerja sama multipihak. Sebaliknya, pola kepemimpinan birokratis dan hierarkis sering menjadi hambatan dalam proses kolaborasi.

Partisipasi masyarakat kepulauan juga menjadi faktor penting dalam penguatan collaborative governance. Pada wilayah yang memiliki modal sosial kuat, tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan relatif lebih tinggi. Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan program, dan pengelolaan sumber daya lokal.

**Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance**

<b>Faktor</b>	<b>Kondisi Pendukung</b>	<b>Kondisi Penghambat</b>
Kapasitas kelembagaan	SDM kompeten dan adaptif	Kekurangan tenaga teknis
Kepemimpinan	Komunikatif dan kolaboratif	Hierarkis dan sektoral
Infrastruktur digital	Akses internet memadai	Jaringan terbatas
Partisipasi masyarakat	Modal sosial kuat	Rendahnya keterlibatan publik
Koordinasi lintas sektor	Forum kolaborasi aktif	Ego sektoral antarinstansi

(Sumber: Hasil penelitian, 2026)

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa collaborative governance pada wilayah kepulauan membutuhkan dukungan kelembagaan yang adaptif dan partisipatif. Tanpa penguatan kapasitas aparatur dan koordinasi lintas sektor, kolaborasi hanya bersifat administratif dan tidak mampu menghasilkan perubahan substantif dalam tata kelola pemerintahan kepulauan.

## 3. Model Collaborative Governance dalam Penguatan Kapasitas Pemerintahan Kepulauan

Berdasarkan hasil penelitian, model collaborative governance yang efektif pada wilayah kepulauan terluar Indonesia harus dibangun melalui pendekatan integratif yang menghubungkan pemerintah pusat,

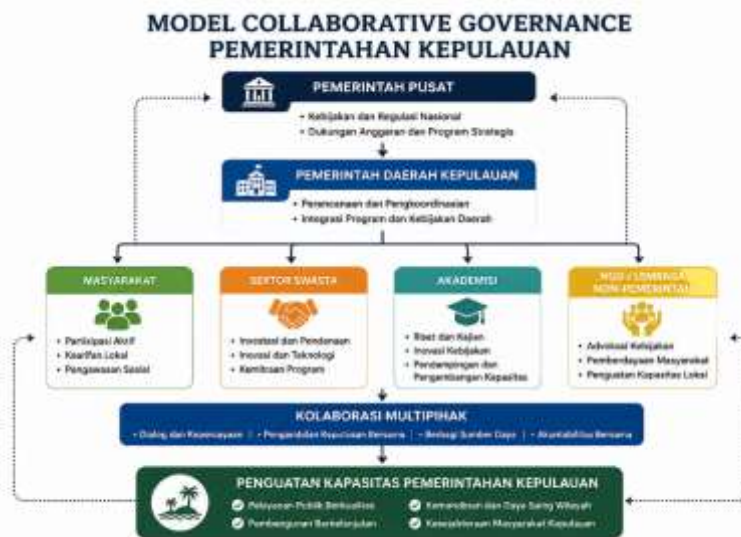
pemerintah daerah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan institusi non-pemerintah dalam satu sistem tata kelola kolaboratif.

Model ini terdiri atas empat elemen utama, yaitu: (1) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; (2) pengembangan jejaring kolaborasi multipihak; (3) digitalisasi tata kelola pemerintahan; dan (4) partisipasi masyarakat berbasis local wisdom. Keempat elemen tersebut saling terintegrasi dalam membangun tata kelola pemerintahan kepulauan yang adaptif dan berkelanjutan.

Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur, reformasi birokrasi kepulauan, dan penguatan sistem koordinasi lintas sektor. Sementara itu, pengembangan jejaring kolaborasi dilakukan melalui pembentukan forum multipihak yang berfungsi sebagai ruang koordinasi pembangunan wilayah kepulauan.

Digitalisasi pemerintahan menjadi aspek penting dalam model collaborative governance karena mampu mengatasi hambatan geografis dan keterbatasan akses pelayanan publik. Implementasi SPBE, pelayanan administrasi daring, dan integrasi data pemerintahan menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas tata kelola wilayah kepulauan.

Partisipasi masyarakat berbasis local wisdom juga menjadi elemen penting dalam model ini. Kearifan lokal masyarakat pesisir dan kepulauan dapat menjadi modal sosial dalam memperkuat keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumber daya wilayah.



**Gambar 1. Model Collaborative Governance Pemerintahan Kepulauan**

(Sumber: Hasil konstruksi peneliti, 2026)

Model collaborative governance tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui integrasi aktor, sumber daya, teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam satu sistem tata kelola yang kolaboratif. Temuan ini sejalan dengan konsep collaborative public management yang menekankan pentingnya sinergi antaraktor dalam menyelesaikan persoalan publik yang kompleks.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pendekatan collaborative governance sebagai model tata

kelola yang relevan dalam konteks pemerintahan kepulauan dan wilayah terluar. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa pemerintah perlu memperkuat desain kelembagaan kolaboratif, meningkatkan kapasitas digital pemerintahan daerah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah kepulauan secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance menjadi pendekatan yang relevan dan strategis dalam penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan pada wilayah terluar Indonesia. Kompleksitas permasalahan wilayah kepulauan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya konektivitas antarwilayah, keterbatasan sumber daya aparatur, dan ketimpangan pelayanan publik, tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan birokrasi yang bersifat sektoral dan hierarkis. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, adaptif, dan partisipatif dengan melibatkan berbagai aktor lintas sektor.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi collaborative governance pada wilayah kepulauan telah diwujudkan melalui forum koordinasi pembangunan, kerja sama pelayanan publik, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah kepulauan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan organisasi non-pemerintah terbukti mampu memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dalam menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya.

Efektivitas collaborative governance dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kepemimpinan kolaboratif, kualitas infrastruktur digital, koordinasi lintas sektor, serta tingkat partisipasi masyarakat. Kelemahan pada salah satu aspek tersebut berpotensi menghambat keberhasilan tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan kepulauan.

Penelitian ini juga menghasilkan model collaborative governance pemerintahan kepulauan yang menekankan integrasi kapasitas kelembagaan, pengembangan jejaring multipihak, digitalisasi tata kelola pemerintahan, dan partisipasi masyarakat berbasis kearifan lokal. Model tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif pendekatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan wilayah terluar Indonesia secara lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian collaborative governance dalam konteks pemerintahan kepulauan dan administrasi publik wilayah terluar. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penguatan kapasitas pemerintahan kepulauan melalui pendekatan kolaboratif yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan wilayah kepulauan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aulich, C., Gibbs, M., Gooding, A., McKinlay, P., Pillora, S., & Sansom, G. (2011). *Consolidation in local government: A fresh look*. Australian Centre of Excellence for Local Government.

- Bebbington, A., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2006). Local capacity, village governance, and the political economy of rural development in Indonesia. *World Development*, 34(11), 1958–1976. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.11.025>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663. <https://doi.org/10.1111/puar.12432>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Firman, T., Kombaitan, B., & Pradono, P. (2020). The dynamics of Indonesia's urbanisation, 1980–2015. *Urban Policy and Research*, 25(4), 433–454. <https://doi.org/10.1080/08111140701540752>
- Hidayat, R., & Wicaksono, K. W. (2022). Collaborative governance in coastal and island development policy in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 14(2), 215–228. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.215-228>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nabatchi, T., Sancino, A., & Sicilia, M. (2017). Varieties of participation in public services: The who, when, and what of coproduction. *Public Administration Review*, 77(5), 766–776. <https://doi.org/10.1111/puar.12765>
- Purwanto, E. A., Zuhro, R. S., & Kurniawan, T. (2021). Governance challenges in Indonesian archipelagic regions: Public service and institutional capacity issues. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 45–60. <https://doi.org/10.22146/jsp.59812>
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2018). The democratizing impact of governance networks: From pluralization, via democratic anchorage, to interactive political leadership. *Public Administration*, 83(2), 195–225. <https://doi.org/10.1111/j.0033-3298.2005.00481.x>
- Sudarmo. (2020). *Collaborative governance dalam perspektif administrasi publik*. Gava Media.
- Suharyanto, A. (2021). Capacity building of local government in border and island areas in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(3), 301–315. <https://doi.org/10.31506/jap.v18i3.11745>
- United Nations Development Programme. (2020). *Governance for sustainable development in small island regions*. UNDP Publications. <https://www.undp.org>
- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). Decentralization, local governance, and public service delivery in Indonesia. *Journal of Social and Development Sciences*, 3(2), 45–59.
- World Bank. (2021). *Indonesia marine and coastal governance review*. World Bank Publications. <https://www.worldbank.org>
- Yusuf, M., & Resosudarmo, B. P. (2019). Decentralization and regional development disparities in Indonesia. *Regional Statistics*, 9(2), 78–95. <https://doi.org/10.15196/RS090204>